

# RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) 2020 - 2024



**DIREKTORAT JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I PALEMBANG  
JL. Sultan Mahmud Badaruddin II , KM. 11 NO. 55  
PALEMBANG - 30154**

## KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Palembang tahun 2020-2024 Revisi III ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui surveilans berbasis laboratorium dan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan wilayah kerja (Regional). Program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat menjadi dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya pelaksanaan surveilans laboratorium kesehatan, analisis dampak kesehatan lingkungan, peningkatan kapasitas tenaga epidemiologi, dan pengembangan teknologi. Bagi kepala seksi dibawah Satuan kerja, diharapkan RAK 2020-2024 dapat berguna sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 Revisi III ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Februari 2023  
Kepala



**R. Marjunet, SKM, M.Kes**  
NIP. 196704241989031002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A Kondisi Umum .....	1
B Potensi dan Tantangan .....	3
C Tugas Pokok dan Fungsi .....	12

<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI .....</b>	<b>16</b>
A Visi dan Misi .....	16
B Tujuan Strategis .....	18
C Sasaran Strategis .....	19
D Indikator Kinerja .....	19
E Arah Kebijakan dan Strategi .....	26

<b>BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN .....</b>	<b>29</b>
A Kerangka Logis .....	29
B Rencana Kegiatan .....	30
C Kerangka Kelembagaan .....	37
D Kerangka Regulasi .....	38
E Kerangka Pendanaan .....	39

<b>BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM .....</b>	<b>41</b>
A Pemantauan .....	41
B Evaluasi .....	41
C Pengendalian .....	41

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
----------------------------	-----------

Lampiran

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK 2020-2024 .....	20
Tabel 2.2	Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran RAK Tahun 2020-2024 Revisi I .....	21
Tabel 2.3	Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran RAK Tahun 2020-2024 Revisi 2 .....	22
Tabel 2.4	Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran RAK Tahun 2020-2024 Revisi 3 .....	23
Tabel 3.1	BTKLPP Kelas I Palembang Tahun 2022-2024 .....	31
Tabel 3.2	Target Kinerja Rencana Aksi Kegiatan Revisi 3 BTKLPP Kelas I Palembang Tahun 2022-2024.....	32
Tabel 3.3	Kerangka Pendanaan Indikator Kegiatan Tahun 2020-2024.....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BTKLPP Kelas I Palembang .....	13
Gambar 1.2	Crosscutting Tugas Pokok dan Fungsi .....	15
Gambar 3.1	Cascading Visi, Misi, dan Sasaran Strategis.....	29
Gambar 3.2	Cascading Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan .....	30
Gambar 3.3	Peta Proses Bisnis BTKLPP Kelas I Palembang .....	37

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Kondisi Umum**

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, membutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di wilayah dilaksanakan berbagai program salah satunya adalah dukungan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Sejak ditetapkannya Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program pada tahun 2020, telah terjadi disrupsi besar-besaran dalam kehidupan manusia bahkan

pada skala global karena adanya pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 yang kemudian diperkirakan akan menjadi endemik, memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk menyesuaikan kebijakan sekaligus membangun konsep untuk perubahan cara hidup masyarakat. Salah satu sektor yang terkait langsung dengan pandemi ini adalah sektor kesehatan.

Adanya Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dilakukan sebagai rumusan operasional atas gagasan dan konsep transformasi tersebut. Substansi perubahan Renstra dan Rencana Aksi Program mencerminkan prinsip dan tujuan dari transformasi kesehatan. Renstra Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menggambarkan kapasitas dan bentuk respons Kementerian Kesehatan dalam menjawab disrupsi dan tantangan di masa yang akan datang

Merujuk pada amanah tersebut BTKLPP Kelas I Palembang sebagai salah satu satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah binaan eselon 1 Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) telah menetapkan RAK 2020-2024 BTKLPP Kelas I Palembang pada tanggal 31 Agustus 2020, dengan mengacu kepada Renstra yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024. Pada bulan September 2021, BTKLPP Kelas I Palembang melakukan revisi terhadap Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024 dengan menambahkan Sasaran Strategis untuk kegiatan pada dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Serta BTKLPP Kelas I Palembang melakukan perubahan terhadap target kinerja pada tahun 2021, hal ini dipandang perlu karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena pandemic covid-19 yaitu kegiatan pelaksanaan Survei TAS Filariasis yang semula 8 lokasi menjadi 4 lokasi sehubungan dengan perubahan format baru dan hasil pengujian di laboratorium Parasitologi FKUI berdasarkan surat dari Direktur P2PTVZ No.04.01/3/2728/201 tanggal 24 Mei 2021. Sehingga dialihkan ke kegiatan Survei Kecacingan dan Pre TAS masing-masing 1 lokasi dan sebagian lagi difocusing untuk mendukung kegiatan Covid-19.

Seiring berjalannya waktu maka pada bulan April 2022 telah dilakukan revisi terhadap Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan

terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dimana revisi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan percepatan program pembangunan kesehatan, penyelenggaraan transformasi sektor kesehatan, serta perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan. Dengan demikian Rencana Aksi Program Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit juga mengalami perubahan yang merupakan satu kesatuan dalam Revisi Rencana Aksi Kegiatan dengan menuangkan perubahan yaitu:

- Penyusunan Visi dan Misi;
- Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis;
- Penyusunan Arah Kebijakan, Strategi dan Kerangka Regulasi.

Secara umum, capaian kinerja BTKLPP Kelas I Palembang selama beberapa tahun terakhir sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian pada masing-masing indikator kinerja yang rata-rata 108%.

Adapun keberhasilan dalam pencapaian kinerja tersebut karena dukungan pimpinan unit utama, sinergitas kegiatan dengan unit utama, komitmen semua pegawai, konsultasi dan bimbingan teknis dari unit utama dan lintas program/lintas sektor di wilayah kerja, optimalisasi penggunaan sumber daya serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pencapaian kinerja kegiatan.

Mulai tahun 2023, terdapat penambahan indikator direktif pimpinan dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan pengendalian penyakit Nomor: PR.03.02/C.I/1142/2023 tanggal 02 Februari 2023 perihal Penambahan Indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Adapun penambahan indikator tersebut adalah:

1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti
2. Persentase realisasi anggaran

## **B. Potensi dan Tantangan**

Wilayah layanan BTKLPP Kelas I Palembang ada di 3 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 Kab/Kota dengan luas wilayah 87.017.41 km<sup>2</sup>, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 7 Kab/Kota dengan luas wilayah sebesar 16.424,06 km<sup>2</sup>, dan Provinsi Bengkulu terdiri dari 10 Kab/Kota dengan luas wilayah 19.919,33 km<sup>2</sup>.



Beberapa potensi dan tantangan yang dihadapi oleh BTKLPP Kelas I Palembang dalam mendukung tercapaian indikator kinerja kegiatan dalam kurun waktu tahun 2020- 2022 berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

### **1) Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan dan Penilaian Penularan Filariasis**

Potensi:

- a) Merupakan Program Prioritas Nasional sehingga menjadi salah satu program yang menjadi perhatian khusus.
- b) Adanya tenaga supervisor program TAS Filariasis yang terlatih sebanyak 8 orang dan 2 orang supervisor program kecacingan. Tenaga terlatih tersebut telah siap untuk dilibatkan dalam pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan di wilayah layanan.
- c) Adanya beberapa wilayah di Indonesia yang merupakan daerah endemis malaria, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan malaria yang lebih baik lagi.
- d) Tersedianya mikroskop di instalasi parasitologi sejumlah 4 buah dalam kondisi baik.

Tantangan:

- a) Tidak adanya alokasi penganggaran pada tahun 2023 untuk seluruh kegiatan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan.
- b) Belum adanya ruangan yang layak untuk melaksanakan pewarnaan dan pemeriksaan kecacingan dan filariasis.
- c) Belum terlatihnya petugas yang kompeten dalam melakukan pemeriksaan malaria.
- d) Belum adanya ruangan penyimpanan alat dan reagen yang sesuai dengan standar.
- e) Proses pengadaan reagen yang harus menunggu dari supplier, khususnya RDT *Brugia malayi* sehingga pelaksanaan kegiatan TAS dilaksanakan di bulan Oktober – Desember.

### **2) Penyelidikan Epidemiologi**

Potensi:

- a) BTKLPP Kelas I Palembang masuk ke dalam jejaring kemitraan laboratorium dan kemitraan yang terjalin dengan baik dengan stake holder yang ada di wilayah layanan.
- b) Surveilans dapat mengakses EWARDS dan ikut dalam pengumpulan data kasus.

- c) Dinas Kesehatan Kab./Kota/Propinsi menginformasikan apabila terjadi KLB di wilayah layanan.
- d) Tim TGC bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kab./Kota/Propinsi dalam mengendalikan KLB/Wabah.
- e) BTKLPP Kelas 1 Palembang sebagai laboratorium pembina covid-19.

Tantangan:

- a) Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan berupa ancaman dalam bentuk risiko biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit zoonosis (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (new emerging diseases). Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 menjadi tantangan ke depannya dimana kejadian tersebut harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (new emerging diseases).
- b) Dibutuhkan tenaga SDM yang terlatih dalam penanganan KLB/Wabah.
- c) Kesiap siagaan sarana dan prasarana dalam menghadapi kedaruratan Kesehatan masyarakat/KLB/Wabah.

### **3) Pengendalian TB.Paru, Penyakit Tular Vektor, Arbovirosis**

Potensi:

- a) Kebutuhan untuk mengendalikan faktor risiko utama untuk menurunkan beban penyakit menular harus dipantau melalui pengawasan atau surveilans yang efektif secara rutin dan terkoordinasi. Tiga penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus adalah tuberkulosis, HIV/AIDS dan malaria, selain penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Perhatian khusus juga ditujukan untuk penyakit-penyakit infeksi baru yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, serta penyakit-penyakit tropis terabaikan (neglected tropical diseases)
- b) Ketersediaan peralatan yang canggih (PCR dan TCM).
- c) Adanya tenaga yang terampil
- d) Memperkuat Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) dengan mensinergikan puskesmas, rumah sakit (pemerintah dan swasta), klinik, dan dokter praktik mandiri. Ini diperlukan tata kelola yang kuat oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.
- e) Berperan dalam meningkatkan cakupan penemuan kasus TB. Paru

Tantangan:

- a) Akomodasi yang kurang memadai untuk lokasi yang susah dijangkau
- b) Tidak adanya penganggaran untuk kegiatan pengendalian penyakit TB, malaria, rabies pada tahun 2023.

#### **4) Kegiatan Tindakan Pengendalian KLB/Wabah/Situasi Khusus**

Potensi :

Cukup banyak jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan Tim Gerak Cepat (TGC), sehingga kesiapan dari sisi pengetahuan dan keterampilan SDM sudah dapat diandalkan.

Tantangan :

Manajemen dan tata kelola kesiapsiagaan dalam menghadapi KLB/Wabah/Situasi Khusus perlu dipertahankan dengan pelatihan secara berkala agar tetap siap menghadapi situasi tak terduga berkaitan dengan Pengendalian KLB/Wabah/Situasi Khusus

#### **5) Surveilans Faktor Risiko Penyakit PD3I**

Potensi :

Kegiatan ini (pengambilan sampel air) terkait eradikasi polio hanya dilakukan oleh BTKLPP Kelas I Palembang di Sumatera Selatan, sehingga data yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk dukungan pengambilan kebijakan terkait upaya eradikasi polio.

Tantangan :

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I adalah polio, hepatitis B, pertusis, difteri, haemophilus influenzae tipe B, campak dan tetanus. Kegiatan yang dilakukan terkait Eradikasi Polio, terkadang mendapat tantangan dari sisi penentuan lokasi yang ideal untuk pengambilan sampel.

#### **6) Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi Air Minum Isi Ulang**

Potensi :

BTKLPP Palembang memiliki laboratorium yang sudah terakreditasi, sehingga hasil pemeriksaan yang didapatkan akurat dan dapat dijadikan data dukung pengambilan kebijakan terkait upaya pencegahan penyakit berpotensi air minum isi ulang.

Tantangan :

Keterbatasan Sumber Daya (Anggaran) mengakibatkan tantangan dalam hal cakupan kegiatan di Wilayah Kerja BTKL. Meskipun hampir semua wilayah kerja bisa didatangi untuk pengambilan sampel, hanya saja jumlah sampel yang diambil masih sangat terbatas, sehingga belum cukup mewakili gambaran utuh terkait kualitas air minum isi ulang di wilayah tersebut.

#### **7) Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi Indoor Air Quality**

Potensi :

BTKLPP Palembang memiliki laboratorium yang sudah terakreditasi, sehingga hasil pemeriksaan yang didapatkan akurat dan dapat dijadikan data dukung pengambilan kebijakan terkait upaya pencegahan penyakit terkait kualitas udara dalam ruang.

Tantangan :

Keterbatasan Sumber Daya (Anggaran) mengakibatkan tantangan dalam hal cakupan kegiatan di Wilayah Kerja BTKL. Tidak semua wilayah kerja bisa didatangi untuk pengambilan sampel, sehingga hasil yang diperoleh belum cukup mewakili gambaran utuh terkait faktor risiko penyakit berpotensi indoor air quality di wilayah tersebut.

#### **8) Surveilans Faktor Risiko Berpotensi Udara Ambient**

Keterbatasan Sumber Daya (Anggaran) mengakibatkan tantangan dalam hal cakupan kegiatan di Wilayah Kerja BTKL. Meskipun hampir semua wilayah kerja bisa didatangi untuk pengambilan sampel, hanya saja jumlah sampel yang diambil masih sangat terbatas, sehingga hasil yang diperoleh belum cukup mewakili gambaran utuh terkait faktor risiko penyakit terkait kualitas udara ambient di wilayah tersebut.

#### **9) Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB Terkait Makanan**

Potensi :

Kemampuan Laboratorium BTKLPP Palembang untuk melakukan pengujian kualitas makanan, dapat dimanfaatkan dan diandalkan untuk menghadapi situasi khusus (KLB) terkait makanan.

Tantangan :

Pengadaan bahan (reagen) yang terhambat, sehingga pelaksanaan kegiatan ini juga terhambat dan belum dapat dilaksanakan di semester awal.

## **10) Surveilans Pada Situasi Khusus (Arus Mudik Lebaran, Nataru dan Embarkasi Haji)**

Potensi :

Dengan kemampuan laboratorium yang dimiliki, BTKLPP Palembang berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam mendukung lancarnya kegiatan pada situasi khusus. Hal ini juga terbukti pada beberapa event situasi khusus berskala Nasional bahkan Internasional dimana BTKLPP Palembang juga selalu dilibatkan dalam upaya surveilans kesehatan.

Tantangan :

Pandemi covid 19 telah mengubah kondisi dan situasi masyarakat secara umum, sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan ini juga sedikit banyak terpengaruh. Kegiatan yang awalnya sudah direncanakan, terpaksa ditunda atau bahkan tidak di laksanakan karena terkait kebijakan dari pemerintah (misal pembatasan mudik).

## **11) Kegiatan Analisis Data Laboratorium**

Potensi :

Kegiatan ini melibatkan pihak luar (akademisi) sebagai pembahas, hal ini dapat menjadi potensi kerjasama lebih lanjut dengan akademisi dalam menyusun laporan dan menghasilkan rekomendasi kegiatan yang lebih baik.

Tantangan :

Analisis Data Laboratorium adalah kegiatan penyusunan laporan berupa kajian pasif dari data (sampel) konsumen yang masuk ke BTKLPP Palembang. Tantangan yang di hadapi adalah keterbatasan informasi yang diperoleh dari data yang masuk, selain itu sebaran data yang masuk juga diluar kendali yang mengakibatkan penyusunan laporan harus dimaksimalkan dari data apa yang ada.

## **12) Surveilans Akreditasi dan TTG**

Potensi Kegiatan Survailen Akreditasi:

- a) Laboratorium penguji dan kalibrasi telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017
- b) BTKLPP Kelas I Palembang telah tersertifikasi ISO 9001:2015
- c) Peralatan laboratorium yang canggih.
- d) Tarif pemeriksaan sampel yang murah sesuai PP no. 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku di Kemenkes RI.

Tantangan :

- a) Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena berhubungan dengan provider/pihak eksternal seperti adanya perubahan jadwal uji banding/uji profisiensi dan akreditasi laboratorium sehingga realisasi kegiatan hanya dapat dicapai pada akhir tahun.
- b) Pada saat di lapangan ditemukan beberapa kendala yaitu sulitnya mencari referensi alat/ bahan ataupun teknologi pemecahan masalah yang sesuai dengan desain TTG yang akan dibuat, keterbatasan pengetahuan dalam merancang desain atau prototype yang akan dibuat.
- c) Kerusakan alat laboratorium Inductively Coupled Plasma (ICP) sehingga menyebabkan beberapa parameter logam belum dapat dilakukan pengujian di laboratorium dan instalasi belum dapat melakukan program kegiatannya secara optimal.
- d) Kerusakan lemari asam di Instalasi Laboratorium Kimia Air sehingga menyebabkan personil laboratorium Kimia Air bekerja dalam kondisi yang kurang *safety*
- e) Berkurangnya jumlah personil laboratorium Kimia Air dan Kimia Udara karena tugas belajar sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian hasil pengujian di laboratorium.
- f) Beberapa media dan reagensia yang dibutuhkan dalam pemeriksaan laboratorium memiliki waktu kadaluarsa yang singkat dan terkendala dalam proses pengadaan sehingga berpengaruh pada penyediaan *buffer stock*.
- g) Stok media dan reagensia bahan penunjang laboratorium yang telah habis sebelum tahun anggaran selesai dikarenakan terbatasnya anggaran.
- h) Tidak adanya *Biosafety Cabinet (BSC)* di laboratorium Biologi sehingga mempengaruhi kualitas hasil pengujian.
- i) Peralatan laboratorium tidak semuanya dapat dikalibrasi dan dilakukan pemeliharaan karena terbatasnya anggaran.

### **13) Kegiatan Pengawasan Laboratorium Covid-19**

Potensi:

- a) BTKLPP Kelas I Palembang telah memiliki peralatan PCR dan TCM yang lengkap dengan SDM yang terlatih.

- b) Terdapat banyak laboratorium Covid-19 di Provinsi Sumsel yang bisa disupervisi oleh BTKLPP Kelas I Palembang.

Tantangan:

- a) Terdapat laboratorium supervisi lain seperti BBLK Palembang yang diberi kewenangan untuk melakukan supervisi di Provinsi Sumatera Selatan.
- b) Tim laboratorium Covid-19 yang belum memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) laboratorium sehingga memerlukan pembelajaran dengan BTKL lain untuk melakukan langkah lanjutan dalam melakukan supervisi.
- c) Personil Instalasi Virologi hanya 2 orang sehingga perlu penambahan tenaga

#### **14) Kegiatan Pemetaan Wilayah Reseptifitas Malaria**

Potensi:

- a) SDM yang sudah terlatih dalam kegiatan pemetaan wilayah reseptifitas malaria
- b) Koordinasi yang baik di wilayah layanan.
- c) Data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai data pendukung dalam program eliminasi malaria.

Tantangan:

- a) Kondisi cuaca di lapangan yang tidak mendukung kegiatan untuk dilaksanakan
- b) Data kasus yang tidak lengkap dikarenakan terjadinya mutase penanggung jawab program di daerah.
- c) Jarak antar kasus yang terlalu jauh dan berbahaya.
- d) Akomodasi kurang memadai.
- e) APD belum lengkap

#### **15) Kegiatan Surveilans Vektor dan BPP (Monitoring Resistensi Insektisida)**

Potensi

- a) Tenaga fungsional terkait telah mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kegiatan
- b) Data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai data pendukung dalam program eliminasi malaria.

Tantangan

- a) Kondisi cuaca di lapangan yang tidak mendukung kegiatan untuk dilaksanakan

- b) Akomodasi kurang memadai
- c) Reagen yang tidak tersedia (proses pengadaan yang lama)

Serta adanya beberapa potensi yang dimiliki oleh BTKLPP Kelas I Palembang baik dalam menjalankan program kegiatan maupun dalam mencapai indikator kinerja kegiatan:

1. Laboratorium penguji dan kalibrasi telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017
2. BTKLPP Kelas I Palembang telah tersertifikasi ISO 9001:2015
3. Peralatan laboratorium yang canggih.
4. Tarif pemeriksaan sampel yang murah sesuai PP no. 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku di Kemenkes RI.

Permasalahan lain adalah penyakit menular dan tidak menular masih menjadi masalah di wilayah kerja, dengan gambaran situasi yang hampir sama dengan situasi nasional. Beberapa penyakit menular masih menjadi masalah antara lain: TB, diare, DBD, leptospirosis, malaria, serta COVID-19 sebagai new emerging disease.

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) yang diterbitkan Ditjen P2P (2020) menyebutkan bahwa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Sars-CoV-2. Virus ini merupakan virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia/Public Health Emergency of International Concern (KKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar Negara, termasuk ke Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 2 kasus. Dalam kurun waktu yang pendek, yaitu s.d. tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi COVID-19 yang tersebar pada 24 Provinsi.

Pada tahun 2020 jumlah specimen covid yang diperiksa di BTKLPP Kelas I Palembang berjumlah 4.529 spesimen, dan angka ini terus mengalami kenaikan hingga pada bulan September 2021 jumlah pemeriksaan mencapai angka 20.596 spesimen.

Adanya upaya mengatasi permasalahan adalah dengan jejaring kerja dan kemitraan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerja diharapkan dapat membantu tersedianya dukungan data, baik yang berupa data sekunder maupun tersier. Hal ini akan



sangat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan terutama pada kondisi tidak teralokasinya dana untuk survey awal.

Serta hasil kajian diharapkan dapat di distribusikan melalui diseminasi informasi langsung atau tidak langsung sehingga bias ditindaklanjuti.

Penyusunan perencanaan kegiatan pengembangan model dan teknologi tepat guna oleh Instalasi Teknologi Tepat Guna BTKLPP Kelas I Palembang harus disesuaikan dengan Petunjuk Perencanaan.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan R.I. diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 266/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 78 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

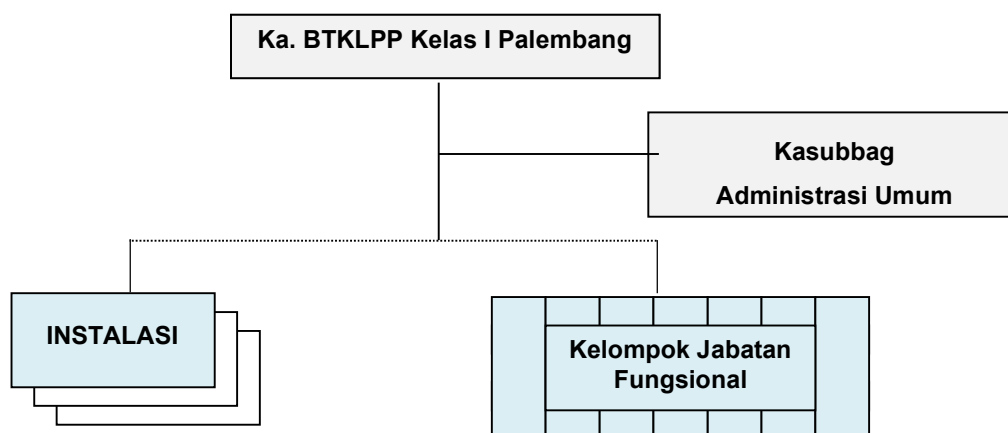
Atas dasar ini pula, BTKLPP Kelas I Palembang dibebani tugas untuk melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) di bidang pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra. Selain melaksanakan tugasnya, BTKLPP Kelas I Palembang juga menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan surveilans epidemiologi.
- b. Pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL).
- c. Pelaksanaan laboratorium rujukan.
- d. Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna.
- e. Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi.
- f. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana.
- g. Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular.
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

- i. Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra.
- j. Pengelolaan data dan sistem informasi.
- k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- l. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

### Struktur Organisasi

Selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit BTKLPP Kelas I Palembang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. Dalam Permenkes tersebut tercantum tugas BTKLPP, yaitu: melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra.



Gambar 1.1  
Struktur Organisasi BTKLPP Kelas I Palembang

a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.

b. Seksi Surveilans Epidemiologi

Seksi Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit menular dan tidak menular, advokasi dan fasilitasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB, kajian, dan diseminasi informasi, kesehatan lingkungan, kesehatan mata, kemitraan dan jejaring kerja, serta pendidikan dan pelatihan bidang surveilans epidemiologi.

c. Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium

Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penapisan teknologi dan laboratorium, kemitraan dan jejaring kerja, kesehatan lingkungan, kesehatan mata serta pendidikan dan pelatihan bidang teknologi dan laboratorium pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan mata.

d. Seksi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan

Seksi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan analisis dampak lingkungan fisik dan kimia, serta dampak lingkungan biologi, serta pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan mata.

e. Instalasi

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BTKLPP Kelas I Palembang mengoptimalkan dukungan dari 1 sub bagian Tata Usaha, 3 seksi yang meliputi Seksi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan, Surveilans Epidemiologi dan Pengembangan Teknologi Laboratorium serta beberapa instalasi yang terdiri dari Instalasi Pelayanan Teknis, Laboratorium Kimia Air, Laboratorium Biologi Lingkungan, Laboratorium Kimia udara, Instalasi Media dan Reagensia, Instalasi Pemeliharaan Mutu



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI**

#### **A. Visi dan Misi**

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (B/BTKL) menjabarkan visi BTKLPP Kelas I Palembang yakni Mewujudkan Surveilans Penyakit dan Faktor Risiko berbasis Laboratorium yang Berkualitas di Wilayah.

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaikan Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi B/BTKL tersebut maka ditetapkan 4 (empat) misi yakni:

1. Meningkatkan surveilans penyakit dan faktor risiko berbasis laboratorium
2. Pengembangan model dan teknologi tepat guna
3. Meningkatkan tata kelola pelaksanaan kegiatan
4. Peningkatan SDM

## **B. Tujuan Strategis**

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen Pencegahan dan Pengendalian penyakit dalam peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko diwilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka BTKLPP Kelas I Palembang telah menetapkan tujuan strategis BTKLPP Kelas I Palembang yakni Terwujudnya surveilans berbasis laboratorium yang berkualitas sebesar 100% pada akhir tahun 2024.

### **C. SASARAN STRATEGIS**

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2P yakni:

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya Pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis B/BTKLPP telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni Meningkatnya pelayanan surevilans laboratorium Kesehatan masyarakat sebesar 100% pada akhir tahun 2024. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terwujudnya surveilans berbasis laboratorium yang berkualitas.

### **D. Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja BTKLPP Kelas I Palembang pada RAK awal tahun 2020-2024 tidak mengalami perubahan hal ini dikarenakan indikator tersebut masih nilai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Akan tetapi mengalami perubahan target dimana target tersebut disesuaikan dengan lokus kegiatan serta volume output pada saat penganggaran dan pelaksanaan kegiatan. Secara lengkap indikator tahun 2020-2024 serta revisi yang telah dilakukan sebagai berikut:



Tabel 2.1  
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK  
BTKLPP Kelas I Palembang Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
1	Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan sebesar 259 laporan.</li> <li>2. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 25%.</li> <li>3. Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam sebesar 90%.</li> <li>4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan sebesar 21 jenis.</li> <li>5. Nilai kinerja anggaran sebesar 80.</li> <li>6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 80%.</li> <li>7. Kinerja Implementasi WBK Satker sebesar 77.</li> <li>8. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 100%.</li> </ol>

Tabel 2.2  
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK  
BTKLPP Kelas I Palembang Revisi 1 Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
1	Mewujudkan peningkatan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan sebesar 261 laporan. 2. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 100%. 3. Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam sebesar 95%. 4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan sebesar 21 jenis.
		Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5. Nilai kinerja anggaran sebesar 90. 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 97. 7. Kinerja Implementasi WBK Satker sebesar 75. 8. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 80%.

Tabel 2.3  
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK  
BTKLPP Kelas I Palembang Revisi 2 Tahun 2022-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
1	Mewujudkan peningkatan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan sebesar 433 laporan. 2. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 100%. 3. Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam sebesar 95%. 4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan sebesar 22 jenis.
		Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5. Nilai kinerja anggaran sebesar 90. 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 97. 7. Kinerja Implementasi WBK Satker sebesar 75. 8. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 80%.

Tabel 2.4  
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK  
BTKLPP Kelas I Palembang Revisi 3 Tahun 2022-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
1	Mewujudkan peningkatan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan sebesar 520 laporan. 2. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 85%. 3. Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam sebesar 95%. 4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan sebesar 22 jenis.
		Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5. Nilai kinerja anggaran sebesar 85. 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 93. 7. Kinerja Implementasi WBK Satker sebesar 75. 8. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 80%. 9. Persentase Realisasi Anggaran sebesar 95% 10. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti sebesar 95%.

Tahun 2022-2024, BTKLPP Kelas I Palembang telah menetapkan 10 indikator yakni:

1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan

Rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/Survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang disampaikan kepada stakeholder terkait.

Indikator ini dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kemungkinan timbulnya dampak atau risiko gangguan kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan melalui pengamatan, pengambilan sampel kualitas lingkungan dan penyakit, serta melakukan pemeriksaan laboratorium untuk dijadikan bahan pembuatan kajian/rekomendasi.

2. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan

Rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/Survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko penyakit, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan stakeholder terkait maupun internal BTKLPP Palembang (tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh BTKLPP) dalam periode 3 tahun terakhir.

Jumlah kegiatan (rekomendasi) surveilans faktor risiko dan penyakit ini berdasarkan hasil analisis laboratorium yang merupakan usulan, rekomendasi dari kegiatan analisis dampak kesehatan lingkungan, surveilans epidemiologi serta laboraotium rujukan yang akan dijadikan bahan pertimbangan kepada mitra kerja.

3. Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam

Respon sinyal Kewaspadaan dini (SKD) Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana yang diterima oleh B/BTKLPP di wilayah layanannya < dari 24 jam dalam 1 (satu)

tahun. Respons berupa komunikasi, rencana PE/Investigasi, lap penerimaan specimen.

4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan

Pembuatan Teknologi Tepat Guna ini adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

5. Nilai kinerja anggaran

Salah satu instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat (tool) yang dapat digunakan untuk membuktikan (prove) apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana, dan untuk umpan balik (feed-back) perbaikan (improve) penganggaran pada periode-periode berikutnya. Nilai kinerja anggaran didasarkan pada penilaian realisasi anggaran, pencapaian RO, dan pencapaian Output Program. Tujuannya adalah untuk memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta capaian volume output kegiatan yang telah ditetapkan.

Nilai Kinerja Anggaran diukur dengan mempertimbangkan penyerapan realisasi anggaran, realisasi volume output yang dihitung dengan menggunakan formula rata geometrik.

6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

7. Kinerja implementasi WBK satker

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian

Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan public.

8. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

9. Persentase Realisasi Anggaran

Laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Indikator ini menggambarkan realisasi anggaran Satker berdasarkan jenis belanja maupun kegiatan sesuai hasil perhitungan pada Aplikasi OMSPAN.

10. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti

Kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi/Tindakan perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan.

#### **E. Arah Kebijakan dan Strategi**

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni Menguatkan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh,

dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

BTKLPP Kelas I Palembang telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sector dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan BTKLPP Kelas I Palembang tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

1. Strategi Surveilans Epidemiologi (SE)

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Surveilans Epidemiologi adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan jejaring dan kemitraan dengan lintas program maupun lintas sektor.
- b) Mengembangkan kemampuan deteksi dini dan respon cepat terhadap KLB.
- c) Melaksanakan respon cepat dan penanggulangan KLB
- d) Melaksanakan diseminasi informasi dan advokasi kepada sektor terkait.

2. Strategi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL)

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan jejaring dan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor.
- b) Melaksanakan kajian kesehatan lingkungan
- c) Melaksanakan kajian pengendalian penyakit
- d) Mengembangkan kemampuan SDM
- e) Melaksanakan pengembangan model
- f) Melaksanakan pengembangan teknologi
- g) Melaksanakan monev penerapan teknologi



### 3. Strategi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium (PTL)

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi dan Laboratorium adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan jejaring dan kemitraan laboratorium
- b) Melaksanakan pengembangan SDM,
- c) Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana
- d) Melaksanakan pemutakhiran metode pengujian
- e) Melaksanakan kalibrasi alat
- f) Melaksanakan quality control

### 4. Strategi Sub Bagian Tata Usaha

Strategi yang digunakan untuk mendukung pencapaian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut;

- a) Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan
- b) Melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan kerumah tanggan.
- c) Melaksanakan pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan.

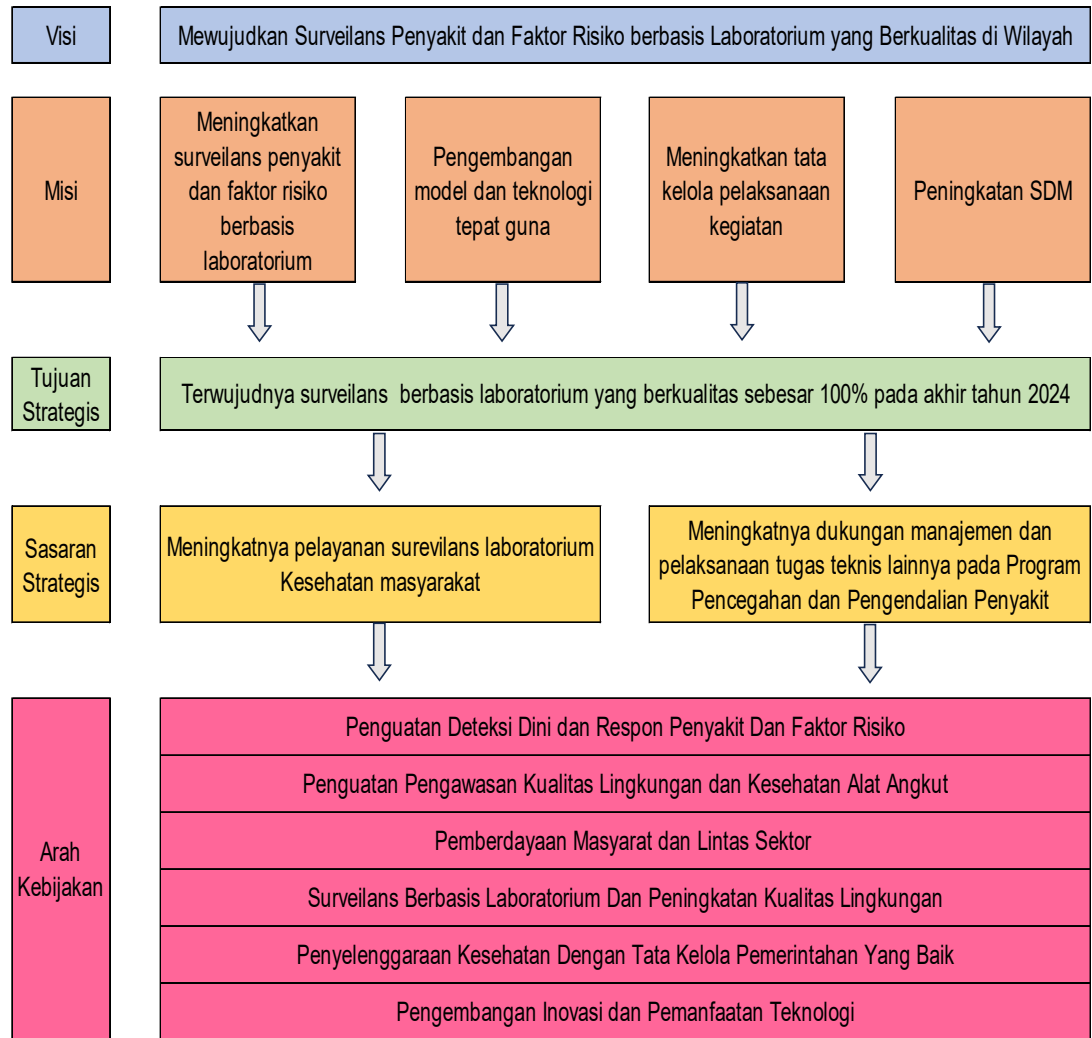
### BAB III

#### RENCANA AKSI KEGIATAN

##### A. Kerangka Logis

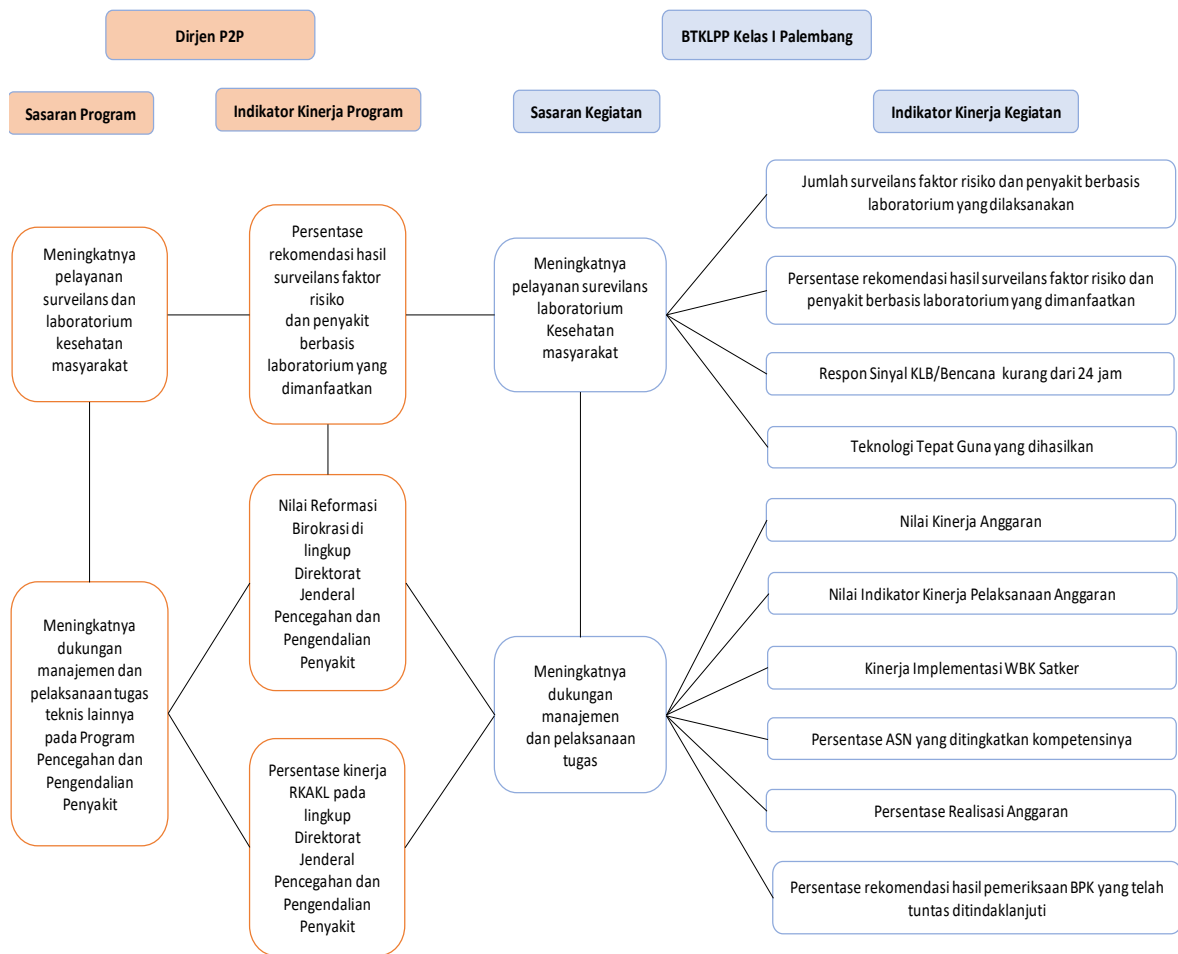
Kerangka logis Rencana Aksi Kegiatan BTKLPP Kelas I Palembang dapat dilihat pada gambar berikut:

- Cascading visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis



Gambar 3.1  
Cascading Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

- cascading Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan



Gambar 3.2  
Cascading Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

## B. Rencana Kegiatan

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2022-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan BTKLPP Kelas I Palembang Tahun 2022-2024.

1) Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel 3.1  
BTKLPP Kelas I Palembang Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	69	46	149	116	140
2	Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	25%	50%	75%	75%	85%
3	Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	90%	95%	95%	95%	95%
4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	5	5	4	4	4
5	Nilai Kinerja Anggaran	80	83	85	85	85
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		83	93	93	93
7	Kinerja Implementasi WBK Satker	70	75	75	75	75
8	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45%	80%	80%	80%	80%
9	Persentase Realisasi Anggaran				95%	95%
10	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti				92,50%	95,00%

Tabel 3.2  
Target Kinerja Rencana Aksi Kegiatan Revisi 3  
BTKLPP Kelas I Palembang Tahun 2022-2024

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja	
		2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat			
1	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	116	140
2	Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	75%	75%
3	Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	95%	95%
4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	4	4
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
5	Nilai Kinerja Anggaran	85	85
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	93
7	Kinerja Implementasi WBK Satker	75	75
8	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	80%
9	Persentase Realisasi Anggaran	95%	95%
10	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%	95%

## 2) Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2022-2024.

Sasaran BTKLPP Kelas I Palembang adalah meningkatnya pelayanan surevilans laboratorium kesehatan masyarakat, untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan  
Kegiatan yang dilakukan :
  - a) Pemetaan luas wilayah reseptifitas daerah malaria
  - b) Survey perilaku vektor DBD
  - c) Surveilans akreditasi laboratorium

- d) Pengembangan laboratorium pengendalian penyakit berpotensi pandemic
- e) Pengawasan laboratorium covid-19
- f) Survey dan kalibrasi alat – alat kesehatan/laboratorium puskesmas
- g) Pre Assesment Penilaian Malaria
- h) Percepatan Eliminasi Malaria
- i) Survey evaluasi prevelansi mikrofilaria pasca POPM Filariasis
- j) Survei penilaian penularan Filariasis dan Kecacingan
- k) Surveilans Arbovirosis berbasis laboratorium
- l) Surveilans Penyakit Zoonosis Lepstopirosis
- m) Surveilans Penyakit Zoonosis lainnya (rickettsia)
- n) Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Zoonosis
- o) Surveilans faktor risiko penyakit PD3I
- p) Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi air minum isi ulang
- q) Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi air bersih
- r) Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi Indoor Air Quality
- s) Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi udara ambient
- t) Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi KLB terkait makanan

Untuk kegiatan di tahun 2023-2024 ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan lagi oleh BTKLPP Kelas I Palembang dikarenakan adanya perubahan petunjuk perencanaan untuk tahun anggaran 2023, adapun kegiatannya terdiri dari:

- a) Surveilans akreditasi laboratorium
- b) Pengembangan laboratorium pengendalian penyakit berpotensi pandemic
- c) Pengawasan laboratorium covid-19
- d) Survey dan kalibrasi alat – alat kesehatan/laboratorium puskesmas
- e) Surveilans sentinel penyakit menular (S3D, Lepstopirosis )
- f) Surveilans Penyakit Zoonosis Lepstopirosis
- g) Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi air bersih/air minum
- h) Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi udara ambient
- i) Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi KLB terkait makanan

2. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan

Kegiatan yang dilakukan :

- a) Pemetaan luas wilayah reseptifitas daerah malaria
- b) Survey perilaku vektor DBD
- c) Surveilans akreditasi laboratorium
- d) Pengembangan laboratorium pengendalian penyakit berpotensi pandemic
- e) Pengawasan laboratorium covid-19
- f) Survey dan kalibrasi alat – alat kesehatan/laboratorium puskesmas
- g) Pre Assesment Penilaian Malaria
- h) Percepatan Eliminasi Malaria
- i) Survey evaluasi prevelansi mikrofilaria pasca POPM Filariasis
- j) Survei penilaian penularan Filariasis dan Kecacingan
- k) Surveilans Arbovirosis berbasis laboratorium
- l) Surveilans Penyakit Zoonosis Lepstopirosis
- m) Surveilans Penyakit Zoonosis lainnya (rickettsia)
- n) Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Zoonosis
- o) Surveilans faktor risiko penyakit PD3I (Erapo)
- p) Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi air minum isi ulang
- q) Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi air bersih
- r) Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi Indoor Air Quality
- s) Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi udara ambient
- t) Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi KLB terkait makanan

Untuk kegiatan di tahun 2023-2024 ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan lagi oleh BTKLPP Kelas I Palembang dikarenakan adanya perubahan petunjuk perencanaan untuk tahun anggaran 2023, adapun kegiatannya terdiri dari:

- a) Surveilans akreditasi laboratorium
- b) Pengembangan laboratorium pengendalian penyakit berpotensi pandemic
- c) Pengawasan laboratorium covid-19
- d) Survey dan kalibrasi alat – alat kesehatan/laboratorium puskesmas
- e) Surveilans sentinel penyakit menular (S3D, Lepstopirosis )
- f) Surveilans Penyakit Zoonosis Lepstopirosis

- g) Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi air bersih/air minum
- h) Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi udara ambient
- i) Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi KLB terkait makanan

### 3. Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam

Kegiatan yang dilakukan :

- a) Penyelidikan Epidemiologi
- b) Tindakan Pengendalian KLB/Wabah/Situasi Khusus
- c) Surveilans Pada Situasi Khusus (Arus Mudik Lebaran. Nataru dan Embarkasi Haji)

Untuk kegiatan di tahun 2023-2024 ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan lagi oleh BTKLPP Kelas I Palembang dikarenakan adanya perubahan petunjuk perencanaan untuk tahun anggaran 2023, adapun kegiatannya terdiri dari:

- a) Penyelidikan Epidemiologi
- b) Tindakan Pengendalian KLB/Wabah/Situasi Khusus

### 4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan

Kegiatan yang dilakukan :

Pelaksanaan pembuatan model dan teknologi tepat guna dalam rangka kewaspadaan dini dan respon KLB. Pembuatan dan Pengembangan model Teknologi Tepat Guna (perancangan, uji fungsi skala lab, uji fungsi lapangan, implementasi, pemantauan fungsi). Termasuk pengalokasian alat dan bahan pendukung TTG, Diantaranya TTG bidang pengendalian vector/binatang pembawa penyakit; TTG bidang pengendalian kualitas air, udara, makanan.

### 5. Nilai Kinerja Anggaran

Kegiatan yang dilakukan :

- a) Sarana dan prasarana internal
- b) Layanan Gaji dan Tunjangan
- c) Layanan perkantoran
- d) Layanan Data dan Informasi



6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Kegiatan yang dilakukan :

- a) Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen
- b) Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program
- c) Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan
- d) Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT, Dekon Tahun Anggaran 2021 dan Semester I tahun 2022.

7. Kinerja Implementasi WBK Satker

Kegiatan yang dilakukan :

- a) Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
- b) Penerapan budaya anti korupsi dalam rangka penguatan UPG
- c) Implementasi Keterbukaan iformasi Publik
- d) Implementasi Budaya Pelayanan Prima

8. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Kegiatan yang dilakukan :

- a) Penyediaan anggaran untuk mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas ASN dalam rangka memenuhi kompetensi sesuai tupoksi ASN baik teknis maupun manajerial.
- b) Mengikuti pelatihan yang bersifat klasikal maupun non klasikal.

9. Persentase Realisasi Anggaran

Kegiatan yang dilakukan :

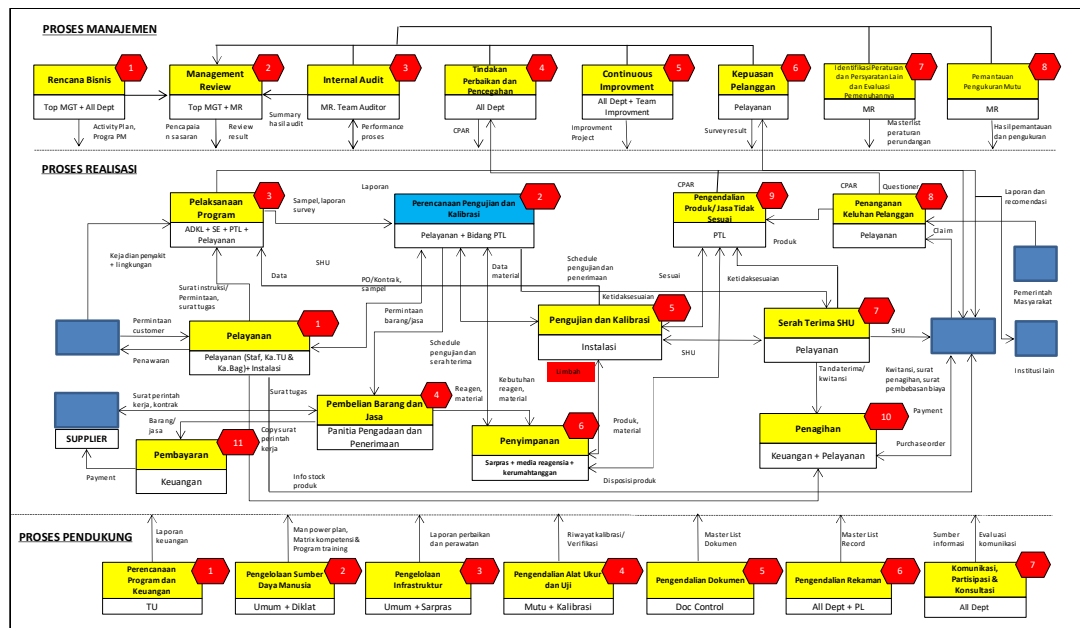
- a) Menyusun anggaran berdasarkan program kegiatan sesuai petunjuk teknis dan berdasarkan *current issue* yang berkembang di Masyarakat.
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
- c) Optimalisasi anggaran
- d) Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

10. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti
- Kegiatan yang dilakukan :
- Melaksanakan program kegiatan secara efektif dan efisien
  - Menyusun pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.

### C. Kerangka Kelembagaan

Dalam mengimplementasikan rencana kegiatan perlu mengenali dan memetakan kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategisnya, meliputi uraian tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tata laksana antar unit, termasuk di dalamnya pengelolaan dan/atau manajemen SDM yang baik secara kuantitas maupun kualitas.

Kerangka kelembagaan yang telah disusun (desain organisasi) telah dijabarkan dalam peta proses bisnis BTKLPP Kelas I Palembang, yang bertujuan untuk memetakan keseluruhan alur proses dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BTKLPP Kelas I Palembang, sekaligus akan dipetakan keterlibatan dan peran dari lintas sektor/pemangku kepentingan/masyarakat dalam pelaksanaan alur proses kegiatan di BTKLPP Kelas I Palembang.



Gambar 3.3  
Peta Proses Bisnis BTKLPP Kelas I Palembang

Peta proses bisnis BTKLPP Kelas I Palembang dibagi menjadi:

- 1) Proses Manajemen
- 2) Proses Realisasi
- 3) Proses Pendukung

#### **D. Kerangka Regulasi**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
8. Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 78 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;

11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 02 tahun 1998 tentang Penentuan Baku Mutu Lingkungan
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 06 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.03.01.160/1/2010 Tentang Perencanaan Strategis Kementerian Kesehatan 2010 – 2014
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.266/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular
16. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.02/1/3130/2019 tentang Standarisasi Instalasi Teknis, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Serta Penetapan Layanan Unggulan Pada Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor: 009/SK/KES/VI/2022 tentang Wilayah Laboratorium Pembina Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis BTKLPP Kelas I Palembang, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. Regulasi dalam bidang teknologi pengendalian penyakit
2. Regulasi dalam bidang pengembangan laboratorium penyakit berpotensi pandemi
3. Regulasi dalam bidang pemanfaatan teknologi tepat guna di masyarakat

#### **E. Kerangka Pendanaan**

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 3.3  
Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Kegiatan  
BTKLPP Kelas I Palembang Tahun 2023-2024

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran		Pelaksana
		2023	2024	
1	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	3.821.563.000	4.203.719.000	Subtansi SE, Substansi ADKL, Substansi PTL
2	Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	-	-	Subtansi SE, Substansi ADKL, Substansi PTL
3	Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	610.654.000	671.719.000	Subtansi SE, Substansi ADKL
4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	44.175.000	48.592.000	Substansi PTL
5	Nilai Kinerja Anggaran	13.880.476.000	15.268.523.000	Subbag Adum
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	216.658.000	238.323.000	Subbag Adum
7	Kinerja Implementasi WBK Satker	95.079.000	104.586.000	Subbag Adum
8	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	803.316.000	883.647.000	Subbag Adum
9	Persentase Realisasi Anggaran	-	-	Subbag Adum
10	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	850.000	850.000	Subbag Adum

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM**

#### **A. Pemantauan**

Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Selain hal tersebut pemantauan juga dilakukan dalam rangka memastikan target indikator yang ditetapkan berjalan sesuai dengan track dan melakukan upaya dini jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan kinerja dilakukan secara rutin baik bulanan ataupun triwulanan dan merupakan hasil kegiatan dan penugasan di setiap staf, subbag/substansi secara berjenjang.

Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan format pelaporan, matriks capaian kinerja, serta menggunakan aplikasi berbasis online (e-Monev DJA, e-Monev Bappenas, OMSPAN, SAKTI dan e-Performance).

#### **B. Evaluasi**

Evaluasi sebagai bentuk informasi dan bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan, berdasarkan keadaan sebenarnya atas suatu kegiatan atau pekerjaan. Untuk itu evaluasi diarahkan guna mengkaji efektifitas dan efisiensi pengelolaan program. Evaluasi dilakukan secara bulanan, triwulan dan semester dengan melibatkan Subbag. Administrasi Umum, Substansi, staf, serta stakeholder terakit.

#### **C. Pengendalian**

Pengendalian dimaksudkan untuk menganalisis terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan tahapan kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau diperkuat.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Revisi-3 BTKLPP Kelas I Palembang Tahun 2022-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya BTKLPP Kelas I Palembang dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Dengan demikian, Subbag dan Substansi di BTKLPP Kelas I Palembang mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Bidang/ seski di BTKLPP Kelas I Palembang. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Revisi-3 BTKLPP Kelas I Palembang, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**Matriks Target Kinerja Kegiatan dan Pendanaan  
Tahun 2020- 2024**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	69	46	149	116	140	4.384.344	18.119.986	5.936.663	4.403.909	4.203.719
2	Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	25%	50%	75%	75%	75%					
3	Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	90%	95%	95%	95%	95%	123.895	630.900	803.630	417.613	671.719
4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	5	5	4	4	4	71.980	96.170	84.200	44.175	48.592
5	Nilai Kinerja Anggaran	80	83	85	85	85	14.645.252	12.009.570	14.777.094	13.022.507	15.268.523
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80	83	93	93	93	44.168	139.161	202.500	230.770	238.323
7	Kinerja Implementasi WBK Satker	70	75	75	75	75	61.474	10.100	63.566	90.421	104.586
8	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	80	80%	80%	80%	136.552	508.957	537.925	828.098	883.647
9	Persentase Realisasi Anggaran				95%	95%					
10	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti				92,5%	95%				684	1.000



**INDIKATOR KINERJA, DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN RAK DAN SUMBER DATA  
BTKLPP KELAS I PALEMBANG TAHUN 2022-2024**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	Surveilans, kajian atau rekomendasi faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP	Jumlah surveilans, kajian, rekomendasi survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko kesehatan, kajian/Survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP selama 1 (satu) tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan Surveilans Epid</li> <li>2. Laporan Pelaksanaan Kajian</li> <li>3. Laporan Pelaksanaan Survei</li> <li>4. Laporan pelaksanaan pengujian</li> <li>5. Laporan pelaksanaan kendali mutu lab</li> </ol>
2	Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	Rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/Survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh B/BTKLPP dan stakeholder terkait dalam periode 3 tahun terakhir	Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko kesehatan, kajian/Survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang dilaksanakan/ditindaklanjuti oleh B/BTKLPP dan atau stakeholder terkait sampai dengan 3 tahun sejak rekomendasi dikeluarkan dibagi umlah rekomendasi hasil kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paparan Dinkes Kab/kota, Propinsi, Tim Kerja, Direktur, Sesditjen, Dirjen, Ka. B/BTKLPP, Litbang, LS,LP, dll terkait;</li> <li>2. Sambutan/ Pidato/ Wawancara/Pers Release;</li> <li>3. Jukren/juknis yang mengutip rekomendasi kita;</li> <li>4. Kegiatan dalam RKAKL/RKA;</li> <li>5. RAP/RAK;</li> <li>6. Laporan/Foto yang menunjukkan rekomendasi kita ditindaklanjuti ;</li> </ol>

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			surveilans atau kajian/survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko kesehatan, kajian/Survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang disampaikan kepada stakeholder terkait selama 3 (tiga) tahun terakhir dikali 100%	7. Surat Pernyataan/Apresiasi Pemanfaatan Rekomendasi Stakeholder/LPLS
3	Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	Respon sinyal Kewaspadaan dini (SKD) Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana yang diterima oleh B/BTKLPP di wilayah layanannya < 24 jam dalam 1 (satu) tahun. Respons berupa komunikasi, rencana PE/Investigasi, laporan penerimaan spesimen	Respon sinyal Kewaspadaan dini (SKD) Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana yang diterima oleh B/BTKLPP di wilayah layanannya < dari 24 jam dalam 1 (satu) tahun. Respons berupa komunikasi, rencana PE/Investigasi, lap penerimaan spesimen dibagi Jumlah Sinyal SKD KLB/Bencana yang diterima oleh B/BTKLPP dalam 1 (satu) tahun	1. Lap/catatan respon KLB/Bencana; 2. Laporan PE KLB/Bencana; 3. Hasil pemeriksaan specimen KLB/Bencana
4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan dan disosialisasikan dalam waktu satu tahun	Akumulasi jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan dan disosialisasikan dalam waktu satu tahun	1. Laporan TTG baru 2. Laporan sosialisasi TTG

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5	Nilai kinerja anggaran	<p>Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan;</li> <li>2) Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan</li> <li>3) Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program</li> </ol>	<p>Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan</p>	<p>Aplikasi E Monev DJA (dashboard)</p>

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	Nilai agregat dari revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, capaian output	- OMSPAN
7	Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	- Laporan penilaian Bagian Hukormas; - Aplikasi Spinal

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
8	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	1. Instrumen Perhitungan; 2. Laporan peningkatan kapasitas ASN dilampirkan sertifikat/surat tugas
9	Persentase Realisasi Anggaran	Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran	Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satker dikali 100%	- Omspan
10	Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK adalah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada Kemenkes dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat BPK dan tercatat dalam Hasil Pemantauan Semester (HAPSEM) BPK	Jumlah kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas di Tindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali 100 %	- Laporan Hasil Pemeriksaan